

PENDIDIKAN ETIKA LINGKUNGAN HIDUP

Orientasi ke arah Pendidikan yang Holistik

Oleh: *Radjasa Mu'tasim*

PENDAHULUAN

Dalam konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT-Bumi) di Rio De Jenairo pada bulan Juni 1992 yang lalu, telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang salah satu diantaranya, yang relevan dengan makalah ini, adalah sebuah kerangka kerja yang diperuntukkan kepada masyarakat internasional yang disebut sebagai AGENDA 21. Rencana kerja ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) pada abad mendatang. Salah satu program dari Agenda 21 yang sangat penting untuk diperhatikan adalah program pendidikan Lingkungan Hidup, yang didalamnya tercakup tiga hal penting (*Bab 36 Agenda 21*), yakni:

- (a). Mereorientasi pendidikan ke arah pembangunan berkelanjutan.
- (b). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga kelestarian lingkungan, dan
- (c). Meningkatkan latihan.

Program-program ini sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari deklarasi dan rekomendasi *Konferensi Tbilisi* yang diselenggarakan oleh UNESCO dan UNEP pada tahun 1977 yang lalu, yang menegaskan perlunya memperhatikan dunia pendidikan dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Program mereorientasi pendidikan sebagaimana diagendakan untuk masyarakat internasional oleh KTT Bumi tersebut, sesungguhnya mengisyaratkan adanya ketidak beresan dunia pendidikan yang bersifat global. Yang pada gilirannya telah mengakibatkan dunia pendidikan tidak lagi bisa diharapkan kontribusinya dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup. Bahkan sebaliknya, pendidikan telah menggelinding sedemikian rupa, sehingga mempunyai andil yang cukup besar terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Mengapa? Karena pendidikan dengan orientasinya yang dipegangi selama ini, justru menghasilkan kualitas manusia yang bersikap eksploitatif pada alam dan

seisinya, dan sedikit menghasilkan kualitas manusia yang mempunyai tanggung jawab dan bersikap etis terhadap lingkungan hidupnya. Dalam konteks ini, pendidikan sebagai usaha yang disengaja dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup secara mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam satu sisi memang dapat menanamkan nilai-nilai etika terhadap lingkungan hidup, sehingga membentuk manusia yang mampu memandang dan bersikap terhadap lingkungan hidupnya sebagai amanah Tuhan yang harus dilestarikan. Tetapi pada sisi lain, juga dapat menghantarkan manusia pada sikap yang memandang alam sebagai obyek eksploitasi belaka, yang menjadi pangkal kerusakan di muka bumi. Nampaknya sisi yang terakhir inilah yang saat ini yang menggejala secara global. Karena itu, keprihatinan para ahli lingkungan hidup terhadap dunia pendidikan sebagaimana terungkap dalam KTT Bumi di Rio De Jenairo tersebut perlu mendapat respon dari para ahli pendidikan secara seksama.

Para ahli pendidikan mengakui bahwa awal mula terjerumusnya pendidikan ke arah yang membahayakan lingkungan ini, bermula dari hilangnya orientasi pendidikan terhadap nilai-nilai etika lingkungan, akibat semakin menguatnya orientasi pendidikan yang memandang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai primadona kehidupan. Saat ini, manusia modern, telah berkeyakinan bahwa kemajuan umat manusia semata-mata tergantung pada teknologi sebagai aplikasi ilmu pengetahuan tersebut. Karena itu, manusia "mengabdikan" kepada IPTEK sebagai sarana untuk menaklukkan alam raya ini. Karena Ilmu Pengetahuan merupakan dasar penciptaan teknologi, pendidikan lalu membuat spesialisasi ilmu pengetahuan yang apabila diterapkan dalam teknologi, mengakibatkan teknologi yang berorientasi sempit, tidak mampu melihat akibat-akibat negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Dengan demikian, pendidikan, sebagaimana telah dikemukakan, perlu mereorientasi kembali agar lebih bersifat holistik tidak fragmentaris, yang ternyata telah sangat membahayakan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Tulisan ini secara ringkas hendak mengemukakan perlunya pendidikan etika lingkungan dalam kerangka membangun orientasi pendidikan yang holistik (berwawasan lingkungan) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) sebagaimana diamanatkan oleh KTT-Bumi yang lalu.

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan, pada intinya adalah menekankan "bagaimana cara membangun tanpa merusak dengan sekaligus menjaga kelestarian

lingkungan" (Thamrin Nurdin, 1993). Konsep tersebut, meskipun telah banyak didiskusikan dalam berbagai forum oleh berbagai kalangan, tetapi masih saja aktual untuk diperbincangkan. Karena bersamaan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup itu, macam-macam pencemaran dan kerusakan lingkungan terus semakin meningkat tanpa ada yang mampu menghentikan. Program-program pembangunan lingkungan hidup, seperti; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Udara Bersih (PRODASIH), Pengolahan Limbah Industri dan lain-lain tidak mampu mengimbangi cepatnya pencemaran dan kerusakan yang berlangsung terus menerus itu. Bahkan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1982, tentang "Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" belum bisa efektif sebagaimana diharapkan. Di sini nampak jelas bahwa upaya untuk melakukan kontrol melalui hukum dan politik ternyata selalu berhadapan dengan kecerdikan dan keculasan manusia menembus jaringan kontrol tersebut. Dan terjadilah *kolusi* untuk saling membiarkan terjadinya berbagai pelanggaran karena adanya kepentingan tertentu. Kembali persoalannya bertumpu pada faktor manusia yang tidak bertanggung jawab.

Pada saat berbagai usaha mengalami kemandegan, kita lalu berfikir kembali akan pentingnya dimensi etis-teologis dalam skala global pembangunan berwawasan lingkungan. Karena dimensi inilah yang mampu menyentuh bidang paling dalam untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan menentukan keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan. Secara teologis, seluruh ajaran agama-agama di dunia bertema sentral pada keserasian hubungan antara manusia dan lingkungannya dan menjelaskan adanya saling ketergantungan keduanya. Hanya saja realitas sosiologis menunjukkan relasi saling ketergantungan keduanya masih menunjukkan kecenderungan saling merusak bahkan saling menghancurkan. Manusia merusak lingkungan yang pada gilirannya hal itu merusak dirinya sendiri. Terjadilah ketegangan yang mengkhawatirkan antara realitas teologis dan realitas sosiologis. Tetapi bagaimanapun, sekali lagi, manusialah yang bertanggung jawab atas semuanya. Oleh sebab itu, sesungguhnya, berbicara mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, adalah berbicara tentang eksistensi, tingkah laku, serta kualitas manusia. "Hanya dalam lingkungan yang baik manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal" (Otto Soemarwoto, 1985). Di sinilah fungsi pendidikan dalam pembangunan berwawasan lingkungan menjadi sangat jelas dan sangat sentral. Karena nilai-nilai etis-teologis yang terkandung dalam setiap ajaran agama, yang menjadi

dasar terbentuknya manusia yang baik sebagaimana dikemukakan, tidak akan fungsional dalam tata kehidupan dan pembangunan, manakala tidak ada institusi yang menjaga dan mendukung nilai-nilai tersebut. Dan pendidikan adalah institusi penting yang dapat memerankan fungsi tersebut. Dengan pendidikan, penanaman nilai-nilai tersebut berjalan efektif. Pendidikan dapat mempengaruhi sikap pandang dan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai etis yang dimaksud. Sayangnya, pendidikan saat ini justru larut dalam pola pikir yang sedang melanda masyarakat, dan menjadi pendukung serta memproduksi manusia-manusia yang bersikap eksploitatif terhadap alam. Dengan demikian, pendidikan yang semula menjadi tumpuan harapan untuk membentuk "manusia yang baik" sesuai dengan ajaran agama guna mendukung pembangunan berkelanjutan, malah menjadi problem pembangunan dan menjadi faktor penting rusaknya lingkungan hidup. Generasi abad XX sebagai produk pendidikan modern cenderung bersikap ingin menaklukkan alam raya dalam rangka mencapai kemajuan yang didambakan, yakni kemajuan material semata yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan sama sekali. Kondisi seperti ini telah menjadi gejala global, dan telah mengundang keprihatinan internasional sebagaimana terungkap dalam Agenda 21 sebagaimana telah dikemukakan di depan.

REORIENTASI PENDIDIKAN DAN ALIH TEKNOLOGI

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa menurunnya kualitas lingkungan hidup yang semakin mengancam kehidupan seluruh isi bumi ini, IPTEK merupakan penyumbang yang dominan. Paradigma efisiensi dan rasional dalam pengembangan IPTEK, secara niscaya tidak memandang dimensi spiritual sebagai data yang patut dipertimbangkan. Karena itu, pengalaman negara-negara maju yang lebih dulu telah mengembangkan IPTEK harus dijadikan referensi bagi negara-negara berkembang dalam melakukan alih teknologi. Bagi bangsa Indonesia; azas pembangunan nasional, modal dasar dan faktor dominan sebagaimana terungkap dalam GBHN '93, telah memberikan rambu-rambu dalam melakukan alih teknologi tersebut.

Dalam pembangunan jangka panjang tahap I yang sudah berlalu, disamping berbagai keberhasilan telah dicapai, berbagai masalah juga muncul menyertai proses industrialisasi yang dilakukan. Padahal pembangunan industri inilah yang dalam pembangunan tahap II juga menjadi prioritas utama. Masalah yang dimaksud adalah bahwa akibat alih teknologi secara besar-besaran guna mendukung industrialisasi secara tidak langsung bangsa Indonesia sedang tergiring pada arah yang telah ditempuh oleh negara-negara maju di Barat. Padahal kita tahu bahwa dari negara-negara industri itulah sumber paling besar terjadinya

berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini. Untuk itu bangsa Indonesia perlu menjaga konsistensi dalam memegang azas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN '93 tersebut, agar terhindar dari kesalahan sebagaimana dilakukan negara-negara industri di Barat.

Kesalahan yang terjadi di negara-negara industri di Barat tersebut bersumber pada masalah yang mendasar yang berkaitan dengan orientasi kebenaran yang mereka anut dan bagaimana membangun tata kehidupan yang berdasarkan pada orientasi tersebut. Bila kita cermati, perkembangan IPTEK di Barat yang telah mencapai puncak kejayaannya di abad modern ini, di latar belakangnya oleh pemikiran yang mengingkari campur tangan Tuhan terhadap kehidupan duniawi. Hal ini telah memunculkan kredo yang amat populer "*Tuhan telah mati*". Kredo itulah yang berlanjut dengan munculnya berbagai aliran filsafat seperti *positivisme* dan *pragmatisme*. Di bidang ekonomi dan politik muncul kapitalisme yang dibarengi dengan *kolonialisme*. Perkembangan IPTEK yang demikian itu hanya mementingkan pendekatan rasional dan mengesampingkan nilai-nilai etis-teologis yang bersumber pada agama. Agama dipisahkan dari aktivitas pembangunan karena dianggap tidak mempunyai relevansi sama sekali. Agama hanya urusan masing-masing pribadi. Agama yang merupakan sumber ajaran moral; yang memberi landasan etik-spiritual bagaimana manusia bertindak, tidak lagi berfungsi memberikan dorongan, motivasi dan kontrol bagi jalannya pembangunan. Pembangunan menjadi skularistik dan a-spiritual. Inilah yang diakui oleh para ahli lingkungan hidup dan para pendidik sebagai pangkal kerusakan di bumi. Karena manusia tidak tahu tujuan hidupnya yang hakiki, lebih mengutamakan tujuan-tujuan jangka pendek, dan tidak merasa punya tanggung jawab terhadap Tuhan, apalagi terhadap sesama manusia dan lingkungannya.

Apabila orientasi pembangunan semata-mata tertuju pada kemajuan materi (kemajuan ekonomi) sebagaimana pengalaman negara-negara maju, kehidupan manusia menjadi rusak karena hanya melihat kemajuan dirinya dari tolok ukur kebendaan. Kritik-kritik yang muncul terhadap komitmen etik: *untuk siapa dan bagi kepentingan apa pembangunan dilaksanakan*, sering kali mental karena desakan politik dan ekonomi yang bermuatan nilai kebendaan semata. Disinilah moral agama diperlukan karena agama dengan jelas dan baku menciptakan sistim etika dan sangsi-sangsi yang frontal terhadap keculasan manusia. Maka jelaslah bahwa agama dengan sistim etikanya itu sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam Islam, misalnya, manusia hidup mengemban tugas sebagai *Khalifah Allah* di muka bumi. Fungsi kekhalifahan itu, mengandung makna bahwa manusia disamping diberi hak dan wewenang untuk mengolah bumi dan seisinya, juga berkewajiban untuk menjaga serta melestarikan segala ciptaan Allah itu. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara konsisten dan seimbang. Nilai keseimbangan inilah sesungguhnya menjadi inti pembangunan berkelanjutan itu. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk mengembangkan sikap kebersamaan berdasarkan kesadaran saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam konsep pembangunan berwawasan lingkungan; "pembangunan itu memerlukan sikap kerja-sama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah antar negara, dan antar generasi" (*Emil Salim, 1986*). Disamping itu, ada nilai yang lebih penting lagi dalam kekhalifahan manusia ini, yakni; tanggung jawab kepada Tuhan. Segala perbuatannya di dunia mesti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari pembalasan (akherat) nanti. Hal ini akan menjadi fungsi kontrol yang paling kuat untuk tidak berbuat kerusakan, dan menjadi motivator untuk berbuat kebaikan.

Kalau institusi pendidikan sebagaimana dikemukakan merupakan faktor penting dalam penanaman nilai-nilai dan pembentukan sikap, maka pendidikan mesti mengembangkan orientasi ke arah fungsi manusia sebagai Khalifah Allah sebagaimana dikemukakan. Agar pendidikan tidak lagi menanggung dosa sebagai penyumbang penting bagi kerusakan lingkungan hidup.

PENDIDIKAN NASIONAL; ANTARA TUJUAN DAN PENDEKATAN

Berdasarkan uraian di depan, dunia pendidikan dituntut untuk merubah dari pendekatannya *fragmenteris* dan *a-spiritual* ke arah pendekatan yang *holistik* dan berwawasan etik keagamaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh KTT-Bumi yang lalu itu.

Dalam konteks ini, pendidikan nasional telah mendahului KTT Bumi tersebut. Yakni empat tahun sebelum KTT bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Pendidikan Nasional, yakni UU RI No. 2 Th 1989. Dalam UU itu, jelas menggambarkan bahwa pendidikan nasional harus dilaksanakan melalui pendekatan yang holistik. Hal ini tertuang secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan sebagai berikut:

"Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Dari sisi tujuan itu, pendidikan nampak sangat utuh yang tidak mungkin terlaksana tanpa melalui pendekatan menyeluruh (holistik). Lihat misalnya unsur iman dan taqwa menjadi prioritas disamping unsur-unsur lain yang diidealkan sebagai sosok manusia Indonesia, seperti; budi pekerti, pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian, dan tanggung jawab. Hanya saja kalau kemudian kita melihat pelaksanaannya di lapangan, nampak jelas bahwa tujuan pendidikan yang sangat indah itu belum bisa dihayati oleh kebanyakan praktisi pendidikan kita. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan di berbagai tingkat pendidikan, yakni cenderung hanya menggunakan satu pendekatan saja, dan sudah sangat spesifik. Pendekatan yang dimaksud adalah *pendekatan teknologik*. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip teknologi dalam melaksanakan program pendidikan, yang arahnya adalah segi kemanfaatan dalam makna untuk menjalankan tugas tertentu yang sifatnya rutin mekanistik (Noeng Muhadjir, tt). Dalam prakteknya secara jelas dapat terlihat di sekolah-sekolah. Setiap guru mengajar dituntut harus mengarahkan pelajarannya, dalam pelajaran apapun pada setiap pertemuan, ke arah kemampuan yang sifatnya operasional melulu. Karena itu, guru harus membuat rencana pengajaran yang disebut sebagai Satuan Pelajaran (SP) dengan rumusan-rumusan tujuan instruksional yang operasional. Keadaan seperti ini bukan saja memberatkan guru, tetapi juga menyita waktu cukup banyak yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan dirinya, dengan membaca buku-buku literatur misalnya. Akibat lebih jauh adalah dangkalnya pemahaman anak terhadap ilmu yang dipelajari. Siswa hanya diajari secara mekanistik bagaimana mengerjakan sesuatu atau menjawab sesuatu, tanpa penghayatan untuk apa sesuatu itu dikerjakan dan harus bertanggung jawab kepada apa dan siapa bila ia mengerjakan sesuatu. Anak juga tidak bisa berkembang karena hanya diajari untuk mengerjakan soal dan tidak diajari bagaimana mempertanyakan ilmu yang dipelajari.

Pendekatan teknologik seperti dikemukakan bukan tidak penting. Pendekatan ini penting dan sangat diperlukan ketika pendidikan sedang menghadapi tuntutan harus menyiapkan tenaga siap pakai (kerja). Jadi cocok untuk kursus-kursus ketrampilan dan pendidikan kejuruan. Anehnya pendekatan ini telah mendominasi pendidikan nasional, khususnya pada tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas.

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena kreatifitas tidak dikembangkan dan apresiasi terhadap lingkungan tidak ditumbuhkan. Oleh sebab itu, untuk mendukung tercapainya pendidikan nasional, pendekatan teknologik jangan menjadi satu-satunya pilihan. Perlu juga dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan lain yang lebih mencerminkan keutuhan pendidikan yang dilaksanakan. Misalnya saja, pendekatan *humanistik* yang menanamkan rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, pendekatan *akademik* yang memacu kreatifitas, dan pendekatan *rekayasa sosial* yang membangun semangat kolektifitas untuk menjaga kepentingan bersama. Dengan demikian pendidikan etika lingkungan hidup dengan mudah dapat masuk melalui berbagai pendekatan tersebut. Sementara pendekatan teknologik tidak memberi kesempatan secara baik masuknya nilai-nilai etis tersebut.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA LINGKUNGAN

Berbicara tentang pendidikan etika lingkungan hidup, tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip etika lingkungan hidup itu sendiri. Oleh *Franz Magnis - Suseno* prinsip tersebut dirumuskan dalam tujuh macam yang ia sebut sebagai Unsur-unsur Etika Lingkungan Baru. Berikut penulis kutipkan secara bebas:

Pertama : Manusia harus belajar menghormati alam. Alam harus dilihat bukan semata-mata sebagai sesuatu yang berguna, melainkan juga mempunyai nilainya sendiri. Kalau terpaksa manusia harus mencampuri proses-proses alam, maka hanya seperlunya dan dengan tetap menjaga keutuhannya. Lebih dari itu, semua *mahluk hidup* harus kita pandang sebagai *saudara*. Manusia bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Hidup dan kesejahteraan makhluk-makhluk hidup semua harus menjadi komitmen kita semua.

Kedua : Manusia harus menanamkan suatu perasaan akan tanggung jawab terhadap *lingkungan lokalnya sendiri*, agar lingkungannya bersih-sehat, alamiah sejauh itu mungkin. Kita jangan sampai membuang sampah seenaknya, kita harus meninggalkan setiap tempat dalam keadaan bersih, tanpa meninggalkan macam-macam kotoran.

Ketiga : Manusia harus bertanggung jawab terhadap *kelestarian biosfer*. Untuk itu diperlukan sikap peka terhadap kehidupan. Kita perlu menanamkan kesadaran mendalam bahwa kita sendiri termasuk biosfer, merupakan bagian ekosistem. Bahwa ekosistem merupakan sesuatu yang halus keseimbangannya, yang tidak boleh kita ganggu

keseimbangannya, yang tidak boleh kita ganggu dengan campur tangan dan perencanaan yang kasar.

Keempat : *Solidaritas dengan generasi yang akan datang* harus menjadi acuan yang baku dalam komunikasi kita dengan lingkungan hidup. Seperti kakek dan nenek tidak mungkin mengambil tindakan terhadap milik yang mereka kuasai tanpa memperhatikan nasib anak dan cucu mereka. Begitu tanggung jawab kita untuk meninggalkan ekosistem bumi kita ini secara utuh dan baik kepada generasi-generasi yang akan datang.

Kelima : Manusia harus mengharamkan dirinya untuk merusak, mengotori, dan meracuni alam. Terhadap alam kita tidak boleh mengambil sikap merusak, mematikan, menghabiskan, mengotori dan menyia-nyiakan. Hal itu kita lakukan bukan hanya di hutan, tetapi juga di rumah, di jalan, di tempat kerja, bahkan di tempat rekreasi. Semboyan etis kita adalah; *membangun tetapi tidak dengan merusak*. Suatu rencana yang hanya dapat terlaksana dengan menimbulkan kerusakan suatu ekosistem yang tak terpulihkan harus diurungkan.

Keenam : Manusia perlu mengembangkan sebuah prinsip *proporsionalitas*. Cukup jelas bahwa setiap kegiatan pembangunan, dalam jangka tertentu, mengubah lingkungan alamiah dan dengan demikian merusaknya. Tidak ada proses pekerjaan yang tidak menghasilkan sampah atau limbah kotor. Maka yang perlu adalah menjaga proporsionalitas tersebut.

Ketujuh : Perlu dikembangkan *prinsip pembebanan biaya pada penyebab*. Tidaklah wajar kalau masing-masing orang, komunitas, maupun perusahaan dan kegiatan lain dibiarkan memproduksi kotoran dan merusak lingkungan, kemudian masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya membangun kembali. Biaya membereskan lingkungan hidup harus dibebankan kepada penyebab kerusakan tersebut. Dengan demikian hasil produksi masing-masing baru menjadi nyata karena biaya lingkungan termuat didalamnya.

PENUTUP

Kemajuan yang dapat dicapai oleh kegiatan pembangunan yang menggunakan IPTEK telah dapat dirasakan dan menimbulkan berbagai kemudahan bagi kehidupan umat manusia. Tetapi berbarengan dengan itu, telah menimbulkan berbagai dampak kerusakan lingkungan hidup

yang amat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri serta seluruh isi bumi. Hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan yang hanya tertuju pada pertumbuhan materi (ekonomi) tanpa memperdulikan nilai-nilai etika lingkungan. Nilai-nilai etika lingkungan, yang semua ajaran agama mempunyai komitmen kepadanya, akan bisa fungsional kembali pada kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan apabila ada institusi yang menjaga dan mendukung nilai-nilai tersebut. Institusi yang paling penting adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai dan membentuk sikap manusia. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang holistik dalam pendidikan sebagaimana dikemukakan di depan.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, T, 1979, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta
- Ancok, D, 1991, *Tantangan Pendidikan Agama dan Modernisasi*, Makalah Seminar Pendidikan Islam, IAIN, Yogyakarta.
- Delgauw, B, 1988, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa; Soedjono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Hadiwijono, H, 1990, *Sari Sejarah Filsafat Barat I, II*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hasan, AR, 1987, *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa*, PLP2M, Yogyakarta.
- Koentowibisono, 1983, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Augus Comte*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Mulkhan, AM, 1993, *Paradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, Sipres, Yogyakarta.
- Nurdin, T, 1993, *Kebijaksanaan Nasional Lingkungan Hidup*, Makalah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, PSL Unsri Palembang.
- Peursen, CA, 1991, *Orientasi di Alam Filsafat*, Diterjemahkan: Dick Hartoko, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sadzali, M, *Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional*, Seri A, Departemen Agama RI.
- Salim, E, 1980, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Soemarwoto, O, 1985, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Djambatan*, Jakarta.